

**EVALUASI PENERAPAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
MENURUT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

(Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

WIDIANTARA

NIM : 012114070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

SKRIPSI

**EVALUASI PENERAPAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
MENURUT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

(Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)

Oleh :

WIDIANTARA

NIM : 012114070



Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si

Tanggal : 20 September 2006

Pembimbing II

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt

Tanggal : 14 November 2006

SKRIPSI

EVALUASI PENERAPAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

MENURUT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

(Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

WIDIANTARA

NIM : 012114070

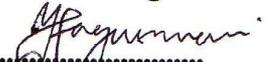
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 23 Februari 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

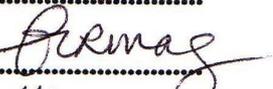
Nama Lengkap

- Ketua** : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
- Sekretaris** : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt
- Anggota** : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si
- Anggota** : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
- Anggota** : Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt

Tanda Tangan


.....

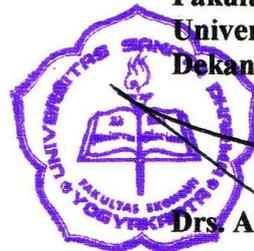

.....


.....


.....


.....

Yogyakarta, 28 Februari 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

***Dalam Nama Bapa Putra dan
Roh Kudus Amin***

**inggih lantaran Sang Kristus
sareng kaliyan Sang Kristus
tuwin manunggil ing Hyang Roh Suci**

*sekecil atau semudah apapun pekerjaan,
bila dilakukan dengan enggan akan menjadi sulit*

*tidak mengerjakan apa-apa merupakan 'pekerjaan'
yang bisa dilakukan setiap orang
(Samuel Johnson)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ✓ *Tuhan Yesus Kristus & Bunda Maria*
- ✓ *Orang Tuaku*
- ✓ *Bapakku di Surga*
- ✓ *Saudara2ku*
- ✓ *Almamater*



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Februari 2007


Penulis

ABSTRAK

**EVALUASI PENERAPAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
MENURUT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
(Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)

Widiantara
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah pos-pos atau akun dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu membandingkan format laporan keuangan oleh Pemerintah Kota dengan format laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, karena di beberapa bagian masih belum ada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

ABSTRACT
AN EVALUATION ON THE APPLICATION
OF FINANCIAL STATEMENT POST
ACCORDING TO GOVERNANCE ACCOUNTING STANDARD
(A Case Study at the Municipality Government of Yogyakarta City)

Widiantara
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

The research aimed to know whether the posts or accounts in the financial statement of the Municipality Government of Yogyakarta City were in line with the Governance Accounting Standard going into effect in this time.

This research was a case study at the Municipality Government of Yogyakarta City. In order to collect the data, the reseacher used library survey, interview and documentation. The technique of data analysis used was by comparing the financial statement format by the Municipality Government and the format of financial statement in the existing Governance Accounting Standard.

Based on the analysis, it was obtained the conclusion that the Municipality Government of Yogyakarta City did not yet fully apply the Governance Accounting Standard as the base of regional financial management, because in some part there was still no suitability with the Governance Accounting Standard.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugrah, karunia dan kasih-Nya sehingga tugas penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tugas akhir ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berupa penelitian mengenai “Evaluasi Penerapan Pos-Pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Berbagai hambatan dan rintangan tampak mewarnai dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Namun, semua itu dapat penulis hadapi dengan semangat untuk terus menyelesaikan tugas ini. Hambatan tersebut juga penulis rasakan sebagai bumbu penyedap dalam perjalanan kehidupan ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu pada halaman ini yang memang dibuat untuk mengungkapkan rasa terima kasih, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi USD.
2. Ir. Drs. Hansiadi Y.H., M.Si.,Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Firma Sulistiyowati, S.E.,M.Si., selaku pembimbing I dan pembimbing akademik yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, pengajaran dan pengarahan selama penulis belajar di bangku kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.

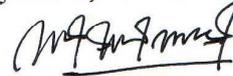
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt., selaku pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, pengajaran dan pengarahan selama penulis belajar di bangku kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., selaku dosen penguji yang telah menguji, memberi masukan atas hasil penelitian ini dan memberikan bimbingan, pengajaran dan pengarahan selama penulis belajar di bangku kuliah.
6. Fr. Reni Retno Anggraini, S.E., M.Si., Ak., yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, pengajaran dan pengarahan selama penulis belajar di bangku kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Drs. P. Rubiyatno, M.M., yang pernah menjadi pembimbing akademik dan pembimbing spiritual, terima kasih atas canda tawa dan ejekannya.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi USD dengan segala titel dan jabatannya yang turut membantu proses belajar penulis selama kuliah.
9. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf Bapeda dan BPKD Kota Yogyakarta atas semua bantuannya kepada penulis dalam mencari data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian penulis.
10. Orang tuaku atas semua yang diberikan.
11. Kakak, adik dan saudara-saudaraku.
12. Rekan-rekan Mudika St. Bartolomeus (STOBA) Sentolo.
13. Teman-teman di kampung tercinta Sentolo.
14. Sobat-sobat di kampus Sanata Dharma dari A-Z.

15. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi 2001.
16. Teman-teman KKP angkatan X khususnya di Jetis, Panjanglejo, Pundong, Bantul.
17. Semua pihak dan sponsor yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini yang telah berperan dan memberi warna dalam perjalanan hidup penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Tak lupa penulis mohon maaf atas kelalaian dan kesalahan kepada semua pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Memberkati. Amin.

Yogyakarta, Februari 2007



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntansi Pemerintahan	7
B. Standar Akuntansi Pemerintahan	8
C. Keuangan Daerah	9
D. Anggaran Publik	12
E. Pelaporan Keuangan Menurut SAP	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Data yang Diperlukan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40

	F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	GAMBARAN UMUM	
	A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta	42
	B. Kondisi Geografis	43
	C. Iklim	45
	D. Pemerintah Daerah	45
	E. Pembagian Wilayah	46
	F. Kependudukan	46
	G. Tenaga Kerja	48
	H. Transmigrasi	49
	I. Transportasi	49
	J. Pos dan Telekomunikasi	50
	K. Kekayaan Alam	51
	L. Nilai-nilai Budaya	52
	M. Ekonomi	54
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Data	56
	B. Perbandingan Pos-pos dalam Laporan Keuangan menurut SAP dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota	68
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Keterbatasan Penelitian	82
	C. Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	25
Tabel II.2	Format Neraca Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota	31
Tabel II.3	Format Laporan Arus Kas	35
Tabel IV.1	Jarak antara Balaikota Yogyakarta dengan kecamatan	46
Tabel IV.2	Rasio jenis kelamin penduduk kota Yogyakarta	47
Tabel IV.3	Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin	48
Tabel V.1	Format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Yogyakarta	57
Tabel V.2	Format Neraca Pemerintah Kota Yogyakarta	60
Tabel V.3	Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Yogyakarta	63
Tabel V.4	Perbandingan Laporan Keuangan menurut SAP dengan pelaporan keuangan Pemkot	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, maka daerah telah diberi wewenang yang luas, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Termasuk juga pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama agar pengelolaan keuangan yang baik dapat dilakukan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka diperlukan suatu sistem yang andal, mudah dipahami yang mampu menyajikan informasi tentang posisi keuangan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya.

Oleh karena itu laporan keuangan harus disusun berdasarkan suatu standar akuntansi pemerintahan yang baku. Alasan-alasan perlunya standar akuntansi antara lain:

1. Terdapat keseragaman dalam praktek-praktek akuntansi sehingga mendorong komparabilitas laporan keuangan
2. Laporan keuangan menjadi lebih informatif bagi pihak ekstern yang tidak terlibat langsung dengan pemerintah daerah
3. Pemerintah akan dapat memantau perkembangan dan kondisi keuangan daerahnya

Standar akuntansi merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi pihak ekstern sehingga dapat dimengerti dan dapat dihindari munculnya bias pemahaman oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana diketahui bahwa kita memiliki daerah propinsi, kabupaten, kota yang kondisinya satu sama lain berbeda tingkat kemajuan, antara lain disebabkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya, maka laporan keuangan yang disusun harus disesuaikan dengan kondisi daerah itu sendiri dalam hal sumber daya dan pendapatan asli daerahnya. Untuk itu standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam menjamin keseragaman praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah.

B. Rumusan Masalah

Apakah pos-pos atau akun yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini ?

C. Batasan Masalah

1. Standar akuntansi yang dimaksud adalah standar akuntansi yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Laporan keuangan yang dimaksud di sini dibatasi pada laporan keuangan yang terdapat dalam PSAP yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pos-pos atau akun dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi, wawasan dan pengetahuan baik bagi mahasiswa maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh serta mendapatkan tambahan pengetahuan dari praktek penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan menjelaskan tentang kajian teori yang melandasi penelitian yaitu tentang Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Keuangan Daerah, Anggaran Publik, dan Pelaporan Keuangan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Bab ini menguraikan tentang situasi dan kondisi kota Yogyakarta secara umum meliputi sejarah singkat berdirinya kota Yogyakarta, kondisi geografis, iklim, pemerintah daerah, pembagian wilayah, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, transportasi, pos dan telekomunikasi, kekayaan alam, nilai-nilai budaya, dan ekonomi.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data dan analisis data yang berhasil dikumpulkan, yang dilanjutkan dengan pembahasan atas hasil analisis data tersebut.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat peneliti atas hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian

Akuntansi Pemerintahan berkaitan dengan proses pengolahan data akuntansi bagi organisasi pemerintahan yang tidak bertujuan menghasilkan laba. Kegiatan akuntansi pemerintahan meliputi kegiatan : penganalisaan, pencatatan, penyimpulan pelaporan dan pengintepretasian transaksi-transaksi unit dan agensi lembaga pemerintahan (Baswir, 2000:7).

Akuntansi pemerintahan dapat juga diartikan sebagai akuntansi mikro yang berfungsi khusus menyajikan informasi keuangan bagi lembaga pemerintahan yang nantinya dipakai dasar pengambilan keputusan.

2. Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Lingkup Akuntansi Pemerintahan di Indonesia adalah (Halim, 2002:30) :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri atas :
 - a. Akuntansi tingkat Propinsi
 - b. Akuntansi tingkat Kabupaten/Kota

3. Lingkungan Akuntansi pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting

lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut (KSAP, 2005a:7) :

Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan :

1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
2. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
3. Adanya pengaruh proses politik
4. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah

Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian :

1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian
2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

B. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
- b. Lampiran I Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan
- c. Lampiran II Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- d. Lampiran III PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan
- e. Lampiran IV PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran
- f. Lampiran V PSAP 03: Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VI PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VII PSAP 05: Akuntansi Persediaan
- i. Lampiran VIII PSAP 06: Akuntansi Investasi
- j. Lampiran IX PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
- k. Lampiran X PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- l. Lampiran XI PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
- m. Lampiran XII PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- n. Lampiran XIII PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian

C. Keuangan Daerah

1. Pengertian

Keuangan daerah dalam arti keseluruhan merupakan harta benda yang menjadi kekayaan daerah (Wajong, 1993:1).

Keuangan Daerah menurut Supriatno (1993:174) :

Kemampuan daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri atas :

- a. Keuangan daerah yang dikelola langsung : APBD dan barang inventaris milik daerah
- b. Kekayaan daerah yang dipisahkan : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keadaan keuangan daerah menentukan corak, bentuk dan kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Daerah sebagai badan hukum publik, yang atas dasar pemberian hak otonomi, mempunyai kebebasan memelihara dan memajukan kepentingan daerah dengan keuangan sendiri.

2. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

3. Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah (Maris, 2000:279)

a. Ketanggungjawaban (*Accountability*).

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

c. Kejujuran.

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan berbuat curang diperkecil.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah.

Tata cara mengurus keuangan daerah harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

e. Pengendalian.

Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan di atas dapat tercapai.

D. Anggaran Publik

1. Pengertian

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2002:62). Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran), dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

2. Pentingnya Anggaran Publik

Beberapa alasan pentingnya anggaran publik yaitu (Mardiasmo, 2002:63):

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan *trade offs*.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

3. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu (Mardiasmo, 2002:63) :

a. Anggaran sebagai Alat Perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

b. Anggaran sebagai Alat Pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

c. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai Alat Politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan dan berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

f. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

g. Anggaran sebagai Alat Motivasi

Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

E. Pelaporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (KSAP, 2005a:38) :

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara / daerah atau oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan Akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

2. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi

sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait (KSAP, 2005a:78).

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak (KSAP, 2005a:82).

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

d. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau entitas pelaporan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

3. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (KSAP, 2005a:22) :

a. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu: DPR atau DPRD dan masyarakat.

b. Manajerial.

Manajerial berarti membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi.

Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

4. Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah (KSAP, 2005a:23) :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

5. Komponen-komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan adalah (KSAP, 2005b:14) :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran disebut juga dengan istilah laporan perhitungan anggaran. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan (KSAP, 2005c:6) :

- (1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- (2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan realisasi anggaran harus menyajikan pos-pos sebagai berikut (KSAP, 2005c:14) :

(1) Pendapatan.

Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara atau kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat atau daerah.

(2) Belanja.

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara atau kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

(3) Surplus atau Defisit.

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.

(4) Pembiayaan.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

(5) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas lain seperti penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil.

(6) Dana cadangan.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Format Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan	xxx	xxx	xx	xxx

6	Daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3s/d6)				
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Transfer Pemerintah Pusat-Dana				
	Perimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana	xxx	xxx	xx	xxx
16	Peimbangan (11 s/d 14)				
17	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
21	Pemerintah Pusat-Lainnya (18+19)				
22	Transfer Pemerintah Propinsi				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	xxx	xxx	xx	xxx
26	(23+24)				
27	Total Pendapatan Transfer (15+20+25)	xxx	xxx	xx	xxx
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
33	(29 s/d 31)				
34	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)	xxx	xxx	xx	xxx
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxx	xxx	xx	xxx
53					

54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43+52+56)	xxx	xxx	xx	xxx
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65					
66	SURPLUS / DEFISIT (33 – 64)	xxx	xxx	xx	xxx
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)	xxx	xxx	xx	xxx
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx

94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
96	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
97	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)	xxx	xxx	xx	xxx
98	PEMBIAYAN NETO (83 – 97)	xxx	xxx	xx	xxx
99					
100	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66+98)	xxx	xxx	xx	xxx

(Sumber : PSAP)

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut (KSAP, 2005a:61) :

- (1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset

diklasifikasikan aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

- (2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

- (3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek

- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Format Neraca berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
FORMAT NERACA
PEMERINTAH PROPINSI / KABUPATEN / KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx

22	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)	xxx	xxx
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27+31)	xxx	xxx
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)	xxx	xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	Jumlah Dana Cadangan (43)	xxx	xxx
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset lainnya (46 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)	xxx	xxx
54			
55	KEWAJIBAN		
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	xxx
58	Utang Bunga	xxx	xxx
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
63	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx

65	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)	xxx	xxx
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)	xxx	xxx
75	JUMLAH KEWAJIBAN (66+74)	xxx	xxx
76	EKUITAS DANA		
77	EKUITAS DANA LANCAR		
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxx	xxx
79	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
80	Cadangan Piutang	xxx	xxx
81	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
82	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	xxx	xxx
83	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)	xxx	xxx
84	EKUITAS DANA INVESTASI		
85	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
87	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
88	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
89	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)	xxx	xxx
90	EKUITAS DANA CADANGAN		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)	xxx	xxx
93	JUMLAH EKUITAS DANA (83+89+92)	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+93)	xxx	xxx

(Sumber : PSAP)

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran. Klasifikasi arus kas

menurut aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas investasi, pembiayaan dan non anggaran. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi (KSAP, 2005d:14).

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut (KSAP, 2005a:74) :

(2) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau daerah

(3) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara atau daerah

Format Laporan Arus kas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.3

**FORMAT LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
7	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
10	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
11	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
16	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx
17	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	xxx	xxx
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	xxx	xxx
21	Belanja Barang	xxx	xxx
22	Bunga	xxx	xxx
23	Subsidi	xxx	xxx
24	Hibah	xxx	xxx
25	Bantuan Sosial	xxx	xxx
26	Belanja tak Terduga	xxx	xxx
27	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
28	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx

30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	xxx	xxx
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18-30)	xxx	xxx
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	xxx	xxx
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	xxx	xxx
43	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
44	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
47	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	xxx	xxx
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset nonkeuangan (40 – 48)	xxx	xxx
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
54	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
55	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
56	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
57	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
58	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
59	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	xxx	xxx
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx

76	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	xxx	xxx
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 – 76)	xxx	xxx
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
81	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
84	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 – 84)	xxx	xxx
86	Kenaikan / Penurunan Kas (31+49+77+85)	xxx	xxx
87	Saldo Awal Kas di BUD	xxx	xxx
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86+87)	xxx	xxx
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
91	Saldo Akhir Kas (88+89+90)	xxx	xxx

(Sumber : PSAP)

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut (KSAP, 2005a:75) :

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap satu objek tertentu, dimana data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa, selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku pada objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian : Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Waktu Penelitian : Bulan Juni – September 2006

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
 - b. Bagian Keuangan Daerah
2. Objek Penelitian :
 1. Prosedur penyusunan laporan keuangan
 2. Laporan keuangan pemerintah kota

D. Data yang diperlukan

1. Gambaran Umum Daerah
2. Format Laporan Keuangan Pemerintah Kota selama satu periode
3. Format Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi pustaka.

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dari hasil studi ini diharapkan akan diperoleh tinjauan pustaka yang relevan dengan permasalahan

2. Wawancara.

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak terkait yang dapat memberikan keterangan yang objektif.

3. Dokumentasi.

Pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, data-data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memaparkan format laporan keuangan pemerintah kota saat ini
2. Membandingkan format laporan keuangan oleh pemerintah kota dengan format laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755. Pada tahun tersebut juga dibangun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di bekas hutan Bering. Daerah itu berada di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada waktu itu.

Pemerintah Kota Yogyakarta dibentuk tanggal 7 Juni 1947. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan itu bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan. Kota Yogyakarta lahir pada saat perjuangan nasional ketika bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat pertama yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Beliau bertanggungjawab langsung atas keadaan Daerah Istimewa

Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia. Tanggal 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanat yang kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.

Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun Pakualaman, telah mempunyai satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Dewan Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman. Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom karena kekuasaan otonomi yang meliputi bidang pemerintahan masih tetap di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otonomi diserahkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 17 tahun 1947 pasal 1 yang menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah di Kabupaten Bantul sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah ini dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

B. Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ}49'26''$ - $07^{\circ}15'24''$ Lintang Selatan, dengan luas sekitar $32,5 \text{ Km}^2$ atau 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak

terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 – 2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa.

Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Secara garis besar Kota Yogyakarta adalah dataran rendah yang dilintasi oleh 3 sungai, yaitu :

Sebelah Timur : Sungai Gajahwong

Sebelah Tengah : Sungai Code

Sebelah Barat : Sungai Winongo

Jarak dari Kota Yogyakarta ke beberapa tempat penting lainnya, seperti :

Candi Prambanan : 15 Km

Candi Borobudur : 40 Km

Kaliurang : 27 Km

Parangtritis : 27 Km

Pantai Samas : 25 Km

Pantai Baron : 61 Km

Makam Imogiri : 18 Km

Gua Selarong : 9 Km

Kraton Solo : 68 Km

Tawangmangu : 110 Km

Jatijajar : 150 Km

Baturaden : 200 Km

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

C. Iklim

Secara umum, curah hujan tertinggi tahun 2004 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 244 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus (0 mm). Rata-rata hari hujan perbulan adalah 6 hari.

Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 85% dan terendah pada bulan September sebesar 72%. Tekanan udara rata-rata 1.011,4 mb dan suhu udara rata-rata 26,3°C.

D. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

E. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 610 RW, dan 2.512 RT dengan luas wilayah 32,5 km².

Penggunaan lahan paling banyak dipergunakan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.099.263 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 22.287 hektar.

Tabel IV.1
**Jarak antara Balaikota Yogyakarta
 dengan kantor kecamatan**

Kecamatan	Jarak (Km)
1. Mantrijeron	5,5
2. Kraton	4,0
3. Mergangsan	2,0
4. Umbulharjo	1,0
5. Kotagede	1,0
6. Gondokusuman	3,0
7. Danurejan	1,0
8. Pakualaman	1,5
9. Gondomanan	3,0
10. Ngampilan	5,0
11. Wirobrajan	5,0
12. Gedongtengen	5,0
13. Jetis	4,0
14. Tegalrejo	6,0

Sumber : Monografi Kecamatan se-Kota Yogyakarta dalam BPS Kota Yogyakarta

F. Kependudukan

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 jiwa terdiri dari 194.530 jiwa (48.95 persen) laki-laki dan

202.868 jiwa (51.05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 jiwa. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990 – 2000 sebesar -0,37 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2003 tercatat 392.239 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,93 persen laki-laki dan 51,07 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 12.069 jiwa per km².

Tabel IV.2
**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Yogyakarta
Hasil Sensus Penduduk**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1971	169.491	171.417	99,88
1980	199.755	198.437	100,66
1990	202.002	210.057	96,17
1995	211.968	206.976	102,41
2000	194.530	202.868	95,89

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Tabel IV.3
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kota Yogyakarta

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12.933	12.180	25.113
5-9	12.538	11.959	24.497
10-14	12.658	12.420	25.078
15-19	22.537	25.755	48.292
20-24	32.007	31.814	63.821
25-29	20.234	18.617	38.851
30-34	15.839	16.384	32.223
35-39	13.813	14.587	28.400
40-44	12.372	12.723	25.095
45-49	9.742	9.996	19.738
50-54	6.271	6.990	13.261
55-59	5.633	6.557	12.190
60-64	5.074	6.394	11.468
65-69	3.976	5.453	9.429
70-74	3.305	4.141	7.446
75+	2.986	4.351	7.337
Jumlah	191.918	200.321	392.239

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

G. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 9.984 orang, yang terdiri dari 87,40 persen pegawai pemerintah daerah dan 12,60 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,38 persen, golongan II 25,09 persen, golongan III 52,23 persen dan sisanya golongan IV 20,29 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2004 sebanyak 4.733 orang yang terdiri dari 2.476 laki-laki dan 2.257 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu 47,28 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (39,72 persen), Diploma (10,71 persen), dan sisanya berpendidikan S2, SMP, dan SD.

H. Transmigrasi

Jumlah transmigran dari Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 50 kepala keluarga yang terdiri dari 171 jiwa. Sebagian besar transmigran tersebut berasal dari kecamatan Kotagede dan Jetis, dan daerah penempatan terbanyak adalah Kalimantan Timur.

I. Transportasi

Panjang jalan seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 479.162 km dengan rincian : 324.320 km jalan yang sudah diaspal, 8.202 km jalan tanah, dan 146.620 km jalan diperkeras. Panjang jalan yang berada di bawah kewenangan negara 18.132 km, sedangkan 3.733 km berada di bawah kewenangan Propinsi D.I. Yogyakarta dan 457.297 km berada di bawah kewenangan Kota Yogyakarta. Kondisi jalan secara umum dapat dikatakan layak untuk dilalui, 24,17 persen kondisi jalan baik, 70,37 persen kondisi jalan sedang, dan 5,46 persen kondisi jalan rusak.

Untuk memenuhi transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2004, jumlah kendaraan umum bermotor roda empat atau lebih tercatat sebanyak 8.723 unit. Komposisinya terdiri atas : 8,70 persen mobil penumpang umum, 58,37 persen pick up, 19,40 persen truk, 11,52 persen kendaraan bis. Perhubungan darat kendaraan bus dilayani di terminal Giwangan. Sedangkan perhubungan udara dilayani oleh Bandara Adi Sucipto.

Angkutan kereta api yang ada di Kota Yogyakarta meliputi angkutan untuk penumpang dan barang, yang terdiri dari dua stasiun yaitu stasiun Tugu yang khusus diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta bisnis dan eksekutif dan stasiun Lempuyangan yang diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta ekonomi serta barang.

J. Pos dan Telekomunikasi

Jumlah warung telekomunikasi (wartel) di wilayah Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2003 ada sebanyak 3.604 wartel yang terbagi ke dalam tiga wilayah stasiun telepon otomatis. Di wilayah stasiun otomatis Kotabaru terdapat 2.262 wartel, Pugeran 1.016 wartel, dan Kentungan 326 wartel. Sedangkan jumlah telepon umum yang ada di tiga wilayah stasiun otomatis tersebut mencapai 1.474 sambungan telepon umum kartu dan 376 sambungan telepon umum koin.

Lalu lintas surat pos dan giro selama kurun waktu 2004 mencapai 17.998.000 surat yang dikirim melalui kantor pos yang ada di wilayah Kota

Yogyakarta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya surat yang dikirim naik 16,90 persen.

Sarana komunikasi radio merupakan sarana komunikasi elektronik massal yang sampai saat ini masih banyak digemari. Terdapat 11 stasiun radio swasta di Kota Yogyakarta pada tahun 2004.

K. Kekayaan Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta relatif terbatas baik tanah, air maupun kandungan mineral yang tersimpan dalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas, Kota Yogyakarta mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut adalah :

1. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta adalah tanah alluvial, litosal, regosol, rensina, glomosal, meditrans, dan latosol. Penguasaan tanah di Kota Yogyakarta dikategorikan menjadi 2, yaitu : tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang diwarisi secara turun-temurun yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah untuk kawasan hutan dan tanah untuk kepentingan umum

seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olah raga, kuburan, dan lain-lain.

2. Air

Kondisi sumber daya air di Kota Yogyakarta meliputi air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan untuk kepentingan lainnya. Air tanah dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, perhotelan, dan industri lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

3. Flora dan Fauna

Jenis-jenis tumbuhan yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah padi, ubi kayu, kacang kedelai, kelapa, kapuk dan sebagainya. Jenis binatang meliputi jenis hewan yang ditenakkan seperti sapi, kerbau, domba, ternak unggas, dan binatang satwa lainnya.

4. Bahan Tambang

Bahan tambang yang terdapat di Kota Yogyakarta umumnya termasuk bahan galian golongan C seperti kerikil, pasir dan sebagainya.

L. Nilai-nilai Budaya

Yogyakarta dikenal sebagai kota kebudayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di sekelilingnya. Kebudayaan tersebut antara lain :

1. Kesenian

DIY sebagai pusat kebudayaan Jawa banyak menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri khasnya, terutama tercermin pada bidang seni tari, karawitan klasik, wayang dan ketoprak. Bentuk seni tari diantaranya yaitu tari Bedoyo, tari Golek, tari Serimpi, dan sebagainya.

2. Pakaian Adat

Pakaian adat masyarakat Yogyakarta membedakan antara lain untuk kaum pria dan wanita. Pakaian adat kaum pria terdiri atas tutup kepala (blangkon), baju jas dengan leher tertutup, dan keris yang diselipkan di pinggang. Ia juga mengenakan pakaian batik yang mempunyai motif sama dengan yang dipakai pasangannya. Pakaian wanita terdiri atas kebaya dan kain batik dengan rambut yang disanggul dan diberi hiasan konde.

3. Senjata

Senjata tradisional DIY berbentuk keris dan tombak. Selain itu juga dikenal dengan adanya tosan aji yang mana tosan berarti besi dan aji berarti dihormati karena berpetuah, sehingga tosan aji berarti senjata yang dihormati karena berpetuah.

4. Bangunan

Jenis bangunan tempat tinggal di DIY dikenal dengan empat macam bentuk yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya, yaitu :

- a. Panggape, mempunyai atap satu sisi
- b. Kampung, mempunyai atap dua sisi
- c. Limasan, mempunyai atap tiga sisi

- d. Joglo, mempunyai atap empat sisi seperti limasan hanya bubungannya lebih tinggi

M. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi di kota Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional yaitu menuju keseimbangan antara industri pertanian yang mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor industri semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang perkembangan sektor ekonomi. Sektor ekonomi tersebut adalah :

1. Pertanian

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang utama bagi sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja di Kota Yogyakarta. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Lahan pertanian semakin lama semakin sempit karena dipergunakan untuk pemukiman penduduk.

2. Industri

Industri di Kota Yogyakarta tidak banyak, karena Yogyakarta bukan kota industri. Kota Yogyakarta mempunyai beberapa perusahaan kecil, seperti kerajinan di Kotagede, BUMD, perusahaan susu SGM, dan industri kecil lainnya.

3. Pariwisata

Kota Yogyakarta juga sebagai kota tujuan wisata. Daerah wisata di Kota Yogyakarta meliputi : Kraton Yogyakarta, kawasan Malioboro, kebun binatang Gembira Loka, dan tujuan wisata lainnya.

4. Perdagangan

Pusat perdagangan di Kota Yogyakarta berpusat di pasar Beringharjo dimana pasar ini merupakan pasar terbesar di Kota Yogyakarta, disamping pasar Beringharjo termasuk dalam kawasan Malioboro.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta yang berlokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu data yang terutama diperlukan adalah Format Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005. Laporan keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan diperolehnya data diatas, maka akan dapat dianalisis dan diketahui seberapa jauh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap laporan keuangannya.

Berikut ini format unsur-unsur dalam laporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta :

1. Format Laporan Realisasi Anggaran

Format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel V.1
FORMAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx
1.1.1	Pajak daerah	xxx	xxx	xxx
1.1.2	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xxx
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx
1.2	Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	xxx	xxx	xxx
1.2.2	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx
1.2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	xxx	xxx	xxx
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx
1.3.1.02	Bantuan Dana Kontijensi / Penyeimbang dari Pemerintah	xxx	xxx	xxx
1.3.1.03	Dana Penyesuaian Ad Hoc	xxx	xxx	xxx
1.3.1.04	Hibah	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx
II	BELANJA			
2.1	APARATUR DAERAH	xxx	xxx	xxx
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	xxx	xxx	xxx
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	xxx	xxx	xxx
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	xxx	xxx	xxx
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
2.1.3	Belanja Modal	xxx	xxx	xxx
2.2	PELAYANAN PUBLIK	xxx	xxx	xxx
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	xxx	xxx	xxx
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	xxx	xxx	xxx

2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	xxx	xxx	xxx
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx
2.2.3	Belanja Modal	xxx	xxx	xxx
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx
2.4	Belanja Tidak Tersangka	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx
	Surplus / (Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	xxx	xxx	xxx
III	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Daerah			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	xxx	xxx	xxx
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	xxx	xxx	xxx
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xxx
3.1.5	Hibah	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Penerimaan Daerah	xxx	xxx	xxx
3.2	Pengeluaran Daerah			
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx
3.2.2	Penyertaan Modal	xxx	xxx	xxx
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	xxx	xxx	xxx
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berjalan	xxx	xxx	xxx
3.2.5	Pemberian Piutang Daerah	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pengeluaran Daerah	xxx	xxx	xxx
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN – BELANJA)	xxx	xxx	xxx

(Sumber : BPKD Kota Yogyakarta)

FORMAT PERHITUNGAN KAS

I	PENDAPATAN	Rp	XXX
II	BELANJA	Rp	XXX
	SURPLUS/(DEFISIT)		Rp XXX

III PEMBIAYAAN

- Penerimaan Daerah	Rp	xxx	
- Pengeluaran Daerah	Rp	xxx	
SURPLUS/(DEFISIT)			Rp XXX
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2005 :			Rp XXX

Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan merupakan :

- Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Daerah	Rp	xxx	
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	Rp	xxx	
	Rp	xxx	

**FORMAT PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
DAN SISA KAS**

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2005	Rp	xxx	
Sisa Kas per tanggal 31 Desember 2005	Rp	xxx	
Ditambah :			
Pembukuan karena penyetoran sisa UUDP Tahun Dinas Perhitungan (antara 1 Januari s/d 31 Desember 2005 pada bulan berikutnya Tahun Dinas Perhitungan (antara 1 Januari s/d 10 Januari 2006)	Rp	xxx	
Jumlah :	Rp	xxx	

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2005 merupakan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	Rp	xxx	
- Sisa Lebih RSUD Tahun Berjalan	Rp	xxx	
	Rp	xxx	

2. Format Neraca

Laporan Neraca merupakan suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret

posisi keuangan suatu entitas. Neraca daerah menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada suatu tanggal tertentu, ditinjau dari sudut aktiva, kewajiban dan ekuitas. Neraca berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana penghasilan dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada yang berhak. Informasi neraca berguna untuk memprediksi kemampuan pemerintah kota dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Bentuk Neraca yang dipakai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel V.2
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
FORMAT NERACA
PER 31 DESEMBER 2005 DAN 2004

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Des 2005	31 Des 2004
	ASET		
	ASET LANCAR		
1	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
2	Kas di Kas Swadana RSUD	xxx	xxx
3	Kas Askes Puskesmas	xxx	xxx
4	Deposito	xxx	xxx
5	Piutang Pajak	xxx	xxx
6	Piutang Retribusi	xxx	xxx
7	Piutang Lain-lain	xxx	xxx
8	Uang Muka Pembelian	xxx	xxx
9	Persediaan	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
	INVESTASI PERMANEN		
10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
11	Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
	Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx

12	ASET TETAP		
1	Tanah	xxx	xxx
2	Jalan dan Jembatan	xxx	xxx
3	Bangunan Air	xxx	xxx
4	Instalasi	xxx	xxx
5	Jaringan	xxx	xxx
6	Bangunan Gedung	xxx	xxx
7	Monumen dan Tugu	xxx	xxx
8	Alat-alat Besar	xxx	xxx
9	Alat Angkutan	xxx	xxx
10	Alat Bengkel dan Alat Ukur	xxx	xxx
11	Alat Pertanian	xxx	xxx
12	Alat Kantor dan Rumah Tangga	xxx	xxx
13	Alat Studio dan Komunikasi	xxx	xxx
14	Alat Kedokteran	xxx	xxx
15	Alat Laboratorium	xxx	xxx
16	Buku / Perpustakaan	xxx	xxx
17	Barang Bercorak Seni	xxx	xxx
18	Hewan, Ternak dan Tanaman	xxx	xxx
19	Peralatan Keamanan	xxx	xxx
	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
13	DANA CADANGAN	xxx	xxx
	ASET LAINNYA		
14	Bangunan Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
15	Piutang Angsuran	xxx	xxx
16	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga(BOT)	xxx	xxx
17	Penyertaan Lain-lain	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH ASET	xxx	xxx
	KEWAJIBAN		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
18	Hutang Komitmen	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
20	Hutang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
21	Hutang Kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
22	Hutang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
	EKUITAS DANA		
23	EKUITAS DANA UMUM	xxx	xxx
24	EKUITAS DANA CADANGAN	xxx	xxx

25	EKUITAS DANA DONASI	XXX	XXX
	JUMLAH EKUITAS DANA	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	XXX	XXX

(Sumber : BPKD Kota Yogyakarta)

3. Format Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan arus kas dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Arus kas menyajikan informasi perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi ini juga berguna untuk menilai kemampuan pemerintah kota dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai unit pemerintahan. Informasi ini juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai unit pemerintahan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.

Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel V.3
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
FORMAT LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2005 DAN 2004

No	URAIAN	Per 31 Des 2005 (Rp)	Per 31 Des 2004 (Rp)
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1	Arus Kas Masuk		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	Pajak Daerah	xxx	xxx
	Retribusi Daerah	xxx	xxx
	Bagian Laba dari Usaha Daerah	xxx	xxx
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx
	Total Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx
	PENDAPATAN DANA PERMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT		
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	xxx	xxx
	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	xxx	xxx
	Total Dana Perimbangan	xxx	xxx
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	xxx	xxx
	Dana Penyesuaian Ad Hoc	xxx	xxx
	Total Lain-lain Pendapatan yang sah	xxx	xxx
	Total Arus Kas Masuk	xxx	xxx
2	Arus Kas Keluar		
	BELANJA APARATUR DAERAH		
	Belanja Administrasi Umum	xxx	xxx
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Aparatur Daerah	xxx	xxx
	BELANJA PELAYANAN PUBLIK		
	Belanja Administrasi Umum	xxx	xxx
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	xxx	xxx
	Sub Jumlah	xxx	xxx
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	xxx	xxx
	Belanja tidak Tersangka	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Pelayanan Publik	xxx	xxx
	Total Arus Kas Keluar	xxx	xxx
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan dari Penjualan Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
	Total Arus Kas Masuk	xxx	xxx

2	Arus Kas Keluar		
	Belanja Modal / Pembangunan	xxx	xxx
	Pembelian Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
	Total Arus Kas Keluar	xxx	xxx
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	xxx	xxx
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
1	Arus Kas masuk		
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	xxx	xxx
	Transfer dari Dana Cadangan	xxx	xxx
	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
	Hibah	xxx	xxx
	Total Arus Kas Masuk	xxx	xxx
2	Arus Kas Keluar		
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	xxx	xxx
	Transfer ke Dana Cadangan	xxx	xxx
	Penyertaan Modal	xxx	xxx
	Pemberian Piutang Daerah	xxx	xxx
	Total Arus Kas Keluar	xxx	xxx
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	xxx	xxx
	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	xxx	xxx
	SALDO AWAL KAS	xxx	xxx
	SALDO AKHIR KAS	xxx	xxx

(Sumber : BPKD Kota Yogyakarta)

4. Format Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Gambaran Umum

- A. Letak Geografis dan Luas Wilayah
- B. Penduduk
- C. Hasil Utama Daerah
- D. Organisasi Pemerintahan Daerah
- E. Dasar pengelolaan Daerah

BAB II Kebijakan Penyusunan Anggaran

A. Kebijakan Umum APBD

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan

B. Program dan Kegiatan Prioritas APBD 2005

1. Belanja
 - a. Belanja administrasi umum
 - b. Belanja operasional dan pemeliharaan
 - c. Belanja modal
 - d. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
2. Bidang, Program dan Kegiatan
 - a. Bidang administrasi umum pemerintahan
 - b. Bidang pertanian
 - c. Bidang perindustrian dan perdagangan
 - d. Bidang ketenagakerjaan
 - e. Bidang kesehatan
 - f. Bidang pendidikan dan kebudayaan
 - g. Bidang Sosial
 - h. Bidang permukiman
 - i. Bidang pekerjaan umum
 - j. Bidang perhubungan
 - k. Bidang lingkungan hidup

- l. Bidang kependudukan
 - m. Bidang olah raga
 - n. Bidang kepariwisataan
 - o. Bidang pertanahan
- C. Kebijakan Akuntansi

BAB III Kinerja Keuangan Daerah

A. Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Yogyakarta

B. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah

2. Dana Perimbangan

- a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
- b. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- c. Pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

C. Belanja

1. Realisasi belanja berdasarkan bagian belanja
2. Realisasi belanja berdasarkan bidang kewenangan
3. Realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja

D. Pembiayaan

BAB IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

A. Penjelasan laporan perhitungan APBD

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan

B. Penjelasan pos-pos neraca

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana

C. Penjelasan pos-pos laporan aliran kas

1. Arus kas dari aktivitas operasi
2. Arus kas dari aktivitas investasi
3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan

B. Perbandingan Pos-pos dalam Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Untuk menjawab rumusan masalah, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membandingkan pos-pos atau unsur laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Penulis akan membandingkan pelaporan keuangan secara teoritis dengan praktek yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam menyajikan pos-pos laporan keuangan.

Berikut adalah perbandingan pos-pos laporan keuangan menurut SAP dengan hasil penelitian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel V.4
**Tabel Perbandingan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
 dengan Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota**

1. Neraca

No	Item yang Diperbandingkan	Hasil Penelitian	Teori / Aturan SAP	Keterangan
1	Dasar Pencatatan	Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual	Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual	Sesuai
2	Aset	Aset meliputi : a. Aset lancar b. Investasi permanen c. Aset tetap d. Dana cadangan e. Aset lainnya	Aset meliputi : a. Aset lancar b. Investasi jangka panjang c. Aset tetap d. Dana cadangan e. Aset lainnya	Sesuai
3	Kewajiban	Kewajiban meliputi : a. Kewajiban jangka pendek b. Kewajiban jangka panjang	Kewajiban meliputi : a. Kewajiban jangka pendek b. Kewajiban jangka panjang	Sesuai
4	Ekuitas Dana	Ekuitas dana terdiri dari : a. Ekuitas dana umum	Ekuitas dana terdiri dari : a. Ekuitas dana lancar	Sesuai

		b. Ekuitas dana cadangan	b. Ekuitas dana investasi c. Ekuitas dana cadangan	
--	--	--------------------------	---	--

2. Laporan Realisasi Anggaran

No	Item yang Diperbandingkan	Hasil Penelitian	Teori / Aturan SAP	Keterangan
1	Dasar Pencatatan	Dasar pencatatan menggunakan basis kas	Basis kas untuk laporan realisasi anggaran	Sesuai
2	Pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran	Menyajikan informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan	Menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan	Tidak sesuai, karena Pemkot tidak menyajikan pos transfer
3	Pendapatan	Pendapatan diklasifikasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	Pendapatan diklasifikasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah	Sesuai
4	Belanja	Belanja dikelompokkan menjadi belanja aparatur daerah dan belanja	Belanja dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan	Tidak sesuai, menurut SAP tidak

		pelayanan publik yang masing-masing dibagi menjadi belanja administrasi dan umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka	belanja tidak terduga	ada ketentuan mengelompokkan belanja aparatur dan belanja publik
5	Transfer	Tidak menyajikan pos transfer	Menyajikan pos transfer / bagi hasil ke desa	Tidak sesuai, kegiatan transfer tidak dilaksanakan oleh Pemkot karena baru tersaji dalam SAP
6	Pembiayaan	Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah	Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan	Sesuai
7	Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran	Menyajikan Sisa Lebih / Kurang Pembayaran Anggaran (SILPA/SIKPA)	Menyajikan Sisa Lebih / Kurang Pembayaran Anggaran (SILPA/SIKPA)	Sesuai

3. Laporan Arus Kas

No	Item yang Diperbandingkan	Hasil Penelitian	Teori / Aturan SAP	Keterangan
1	Pengklasifikasian laporan arus kas	Laporan arus kas diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan	Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran	Tidak sesuai, karena pemkot tidak menyajikan aktivitas non anggaran
2	Unsur arus kas masuk	Arus kas masuk dari aktivitas operasi meliputi PAD, pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan yang sah	Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari : a. Penerimaan pajak b. Penerimaan bukan pajak c. Hibah d. Penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya	Sesuai
3	Unsur arus kas keluar	Arus kas keluar dari aktivitas operasi meliputi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta	Arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk : a. Belanja pegawai b. Belanja barang	Sesuai

		belanja tidak tersangka	c. Bunga, subsidi, hibah d. Bantuan sosial e. Belanja lain-lain	
4	Arus kas masuk dari aktivitas investasi	Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan investasi dan pendapatan dari penjualan aset tetap	Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya	Sesuai
5	Arus kas keluar dari aktivitas investasi	Arus kas keluar dari aktivitas investasi meliputi belanja modal/pembangunan dan pembelian investasi jangka panjang	Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya	Sesuai
6	Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan	Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan terdiri dari : a. Penerimaan pinjaman dan obligasi b. Transfer dari dana cadangan c. Penjualan aset daerah yang dipisahkan d. Hibah	Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain : a. Penerimaan pinjaman b. Penerimaan hasil penjualan surat utang negara c. Penerimaan dari divestasi d. Penerimaan kembali pinjaman e. Pencairan dana cadangan	Sesuai
7	Arus kas keluar dari	Arus kas keluar dari aktivitas	Arus keluar kas antara lain :	Sesuai

	aktivitas pembiayaan	<p>pembiayaan terdiri dari :</p> <p>a. Transfer ke dana cadangan</p> <p>b. Penyertaan modal</p> <p>c. Pemberian piutang daerah</p>	<p>a. Penyertaan modal pemerintah</p> <p>b. Pembayaran pokok pinjaman</p> <p>c. Pemberian pinjaman jangka panjang</p> <p>d. Pembentukan dana cadangan</p>	
8	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Tidak terdapat arus kas dari aktivitas non anggaran	Terdapat arus kas dari aktivitas non anggaran yang meliputi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang	Tidak sesuai. Pemkot tidak menyajikan aktivitas non anggaran sehingga tidak ada akun Perhitungan Pihak Ketiga dan kiriman uang
9	Metode pelaporan	Pelaporan arus kas menggunakan metode langsung	Pelaporan arus kas menggunakan metode langsung	Sesuai

4. Catatan atas Laporan Keuangan

No	Item yang Diperbandingkan	Hasil Penelitian	Teori / Aturan SAP	Keterangan
1	Susunan atau isi catatan atas laporan keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari : Bab I Gambaran Umum a. Letak geografis dan luas wilayah b. Penduduk c. Hasil utama daerah d. Organisasi pemerintahan daerah e. Dasar pengelolaan keuangan daerah Bab II Kebijakan Penyusunan Anggaran a. Kebijakan umum APBD b. Program dan kegiatan prioritas APBD c. Kebijakan akuntansi	Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut : a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan c. Kebijakan akuntansi yang penting : 1. Entitas pelaporan 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 3. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan	Sudah memenuhi unsur yang dianjurkan dalam SAP, hanya susunannya yang berbeda

		<p>Bab III Kinerja Keuangan Daerah</p> <p>a. Perkembangan APBD kota Yogyakarta</p> <p>b. Pendapatan</p> <p>c. Belanja</p> <p>d. Pembiayaan</p> <p>Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan</p> <p>a. Penjelasan laporan perhitungan APBD</p> <p>b. Penjelasan pos-pos neraca</p> <p>c. Penjelasan pos-pos laporan aliran kas</p>	<p>4. Kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan PSAP oleh suatu entitas pelaporan</p> <p>d. Penjelasan pos-pos laporan keuangan</p> <p>1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan</p> <p>2. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan</p> <p>e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas</p>	
--	--	--	---	--

			pelaporan yang menggunakan basis akrual	
			f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah	

Dari hasil perbandingan yang telah dilakukan, terdapat pos-pos atau akun yang berbeda antara laporan keuangan Pemerintah Kota dengan SAP. Perbedaan tersebut yaitu :

1. Akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran

Dalam laporan keuangan pemerintah kota, laporan realisasi anggaran menyajikan informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan dalam SAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Jadi laporan keuangan Pemkot belum menyajikan pos transfer.

2. Pengelompokan pos Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran

Dalam laporan keuangan pemerintah kota, belanja dikelompokkan menjadi belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik yang masing-masing dibagi menjadi belanja administrasi dan umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka. Sedangkan dalam SAP, belanja dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Dalam aturan SAP tidak ada ketentuan mengelompokkan belanja aparatur dan belanja publik.

3. Akun Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan Pemkot tidak menyajikan akun atau pos transfer sedangkan dalam SAP disajikan informasi mengenai transfer atau bagi hasil ke desa. Dalam acuan yang dipakai oleh Pemkot memang tidak menyajikan hal tersebut sehingga tidak dilakukan aktivitas transfer.

4. Pengelompokan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas Pemkot diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Sedangkan laporan arus kas menurut SAP diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Pemkot tidak menyajikan aktivitas non anggaran yang berisi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.

5. Aktivitas non anggaran

Pemerintah Kota tidak menyajikan aktivitas non anggaran dalam laporan arus kas, sehingga tidak ada akun yang mencatat Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.

Dari hasil wawancara penulis dengan staf di bagian keuangan, diperoleh informasi bahwa pemerintah kota Yogyakarta mulai menerapkan SAP secara bertahap karena SAP sendiri baru disahkan pada pertengahan tahun 2005. Tetapi, pemerintah kota telah mulai mengikuti sejak SAP belum disahkan dan masih berupa Draft Publikasian.

Secara umum, tidak ada hambatan berarti yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun masih terdapat beberapa perbedaan dalam pos-pos laporan keuangan yang disajikan, karena akan disesuaikan secara bertahap. Saat ini pemerintah kota belum dapat sepenuhnya mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan karena masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan secara garis besar sebagai berikut :

Pemerintah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, karena di beberapa bagian masih belum ada kesesuaian dengan SAP. Akun-akun atau pos yang belum sesuai atau belum dilaksanakan yaitu :

1. Akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran

Dalam laporan keuangan pemerintah kota, laporan realisasi anggaran menyajikan informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan dalam SAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

2. Pengelompokan pos Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran

Dalam laporan keuangan pemerintah kota, belanja dikelompokkan menjadi belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik yang masing-masing dibagi menjadi belanja administrasi dan umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka. Sedangkan dalam SAP, belanja dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

3. Akun Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan Pemkot tidak menyajikan akun atau pos transfer sedangkan dalam SAP disajikan informasi mengenai transfer atau bagi hasil ke desa.

4. Pengelompokan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas Pemkot diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Sedangkan laporan arus kas menurut SAP diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

5. Aktivitas non anggaran

Pemerintah Kota tidak menyajikan aktivitas non anggaran dalam laporan arus kas.

Pemerintah kota belum dapat mengimplementasikan secara penuh Standar Akuntansi Pemerintahan karena masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Sedangkan pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan

Penyusunan Perhitungan APBD; serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).

Pemerintah kota secara bertahap telah mulai menerapkan SAP sebagai pedoman atau panduan dalam penyajian laporan keuangan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan dan pengguna laporan serta pemeriksa laporan (auditor). Hal ini dapat dilihat dalam laporan keuangan yang mulai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum, tidak ada hambatan berarti yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun masih terdapat beberapa perbedaan dalam pos-pos laporan keuangan yang disajikan, karena akan disesuaikan secara bertahap.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam melaksanakan penelitian yaitu :

1. Keterbatasan ruang lingkup penelitian, sehingga kesimpulan hanya berdasarkan dari data yang diperoleh dan hanya berlaku pada pemerintah daerah yang diteliti.
2. Peneliti tidak dapat memperoleh semua data yang diinginkan, karena data tersebut menjadi rahasia pemerintah kota.

3. Referensi teoritis maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis masih sedikit, sehingga penulis kesulitan untuk mengembangkan topik tersebut.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kota yang belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, penulis menyarankan agar secepatnya menyesuaikan penyajian akun-akun atau pos dalam laporan keuangan sesuai SAP sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan agar tercipta transparansi publik, terutama pos-pos yang belum sesuai yaitu :
 - a. Pos transfer sebaiknya disajikan dalam laporan realisasi anggaran agar transaksi yang berhubungan dengan transfer pemerintah dapat tersaji secara jelas.
 - b. Pengelompokan pos belanja sebaiknya mengikuti aturan dalam SAP yaitu belanja dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Dengan begitu tidak terlalu banyak pengelompokan dalam pos belanja yang akan menyulitkan pemakai laporan keuangan.

- c. Aktivitas non anggaran sebaiknya disajikan dalam laporan arus kas untuk melengkapi ketiga aktivitas yang sudah ada apabila memungkinkan. Aktivitas non anggaran ini digunakan untuk mencatat Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.
2. Penelitian ini hanya mengambil bagian proses pencatatan akun-akun dalam laporan keuangan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti proses yang lain, misalnya proses pengukurannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan daerah yang diteliti tidak hanya satu objek saja, agar dapat diketahui juga bagaimana pelaksanaan di daerah lainnya atau dibandingkan dengan daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra(2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baswir, Revrison(2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- KSAP(2005a). *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- KSAP(2005b). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- KSAP(2005c). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 02: Laporan Realisasi Anggaran*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- KSAP(2005d). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 03: Laporan Arus Kas*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Marang, F Antonius Tuli(2004). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: Skripsi USD.
- Mardiasmo(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo(2003). *Penyajian Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Makalah Internet.
- Maris, Masri(2000). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.
- Satrio, Awal(2000). *Telaah Bisnis*, Volume 1 No. 1, Juli 2000. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
- Supriatno(1993). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ichtiar.
- Wajong(1993). *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ichtiar.

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
3. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
6. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP.

7. Interpretasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

7. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut IPSAP, adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP.
8. Buletin Teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.
9. Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan adalah uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP.

Pasal 2

- (1) SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.
- (2) SAP dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh KSAP dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dikembangkan oleh KSAP.
- (5) Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I.
- (6) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II.

Pasal 3

- (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis.
- (2) IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) IPSAP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4

- (3) IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP.

Pasal 4

PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII; dan
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIII.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

Pasal 5

Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

Pasal 3

Ayat (1)

IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP.

Buletin Teknis merupakan arahan/pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 2005 NOMOR 4503



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3312

- Membaca Surat : Ka. Prodi - FE - USD Yogyakarta No : 31/Kaprodi Akt/144/V/2006
Tangga : 23 Mei 2006 Perihal : Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan kepada :
- Nama : WIDIANTARA No. MHSW 012114070
Alamat Instansi : Mrican - Yogyakarta
Judul : PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Yogyakarta)
- Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 28 Juni 2006 s/d 28 September 2006
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

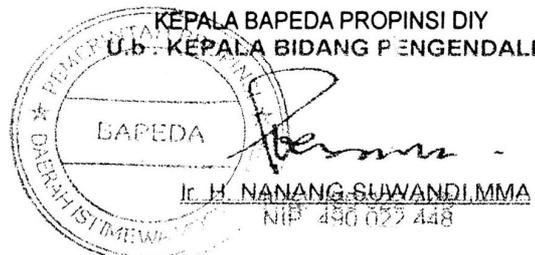
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis. Perijinan;
3. Dekan, FE - USD Yogyakarta;
4. Pertiinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562662

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

NOMOR : 070/1139

Dasar Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/3312 Tanggal : 28/06/2006

- Mengingat :
1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada Nama : WIDIANTARA NO MHS / NIM : 012114070
Pekerjaan : Mahasiswa FE-USD
Alamat : Mrican - Yogyakarta
Penanggungjawab : Fr. Reni Retno Anggraini, SE., M.Si, Ak
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul Proposal: PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 28/06/2006 Sampai 28/09/2006

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

WIDIANTARA

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BPKD Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 JULI 2006

I
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2005**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 84.335.352.000,00	Rp 89.196.416.784,70	105,76
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 43.365.000.000,00	Rp 46.106.723.374,00	106,32
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 23.122.648.000,00	Rp 22.797.438.571,50	98,59
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 6.651.516.000,00	Rp 6.651.534.800,72	100,00
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 11.196.188.000,00	Rp 13.640.720.038,48	121,83
1. 2	Dana Perimbangan	Rp 268.347.705.000,00	Rp 289.257.620.761,54	107,79
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 32.791.705.000,00	Rp 39.446.429.477,00	120,29
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 201.231.000.000,00	Rp 201.231.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 6.600.000.000,00	Rp 6.600.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 27.725.000.000,00	Rp 41.980.191.284,54	151,42
1. 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 15.543.000.000,00	Rp 13.432.864.500,00	86,42
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp -	Rp -	0,00
1. 3 1 03.	Dana penyesuaian Ad Hoc	Rp 11.943.000.000,00	Rp 11.943.000.000,00	100,00
1. 3 1 04.	Hibah	Rp 3.600.000.000,00	Rp 1.489.864.500,00	41,39
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp 368.226.057.000,00	Rp 391.886.902.046,24	106,43

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	BELANJA			
2. 1.	APARATUR DAERAH	Rp 70.775.136.313,00	Rp 64.300.925.069,82	90,98
2. 1. 1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 31.216.908.010,00	Rp 28.980.600.331,82	92,84
2. 1. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 26.218.096.337,00	Rp 24.350.880.584,30	92,88
2. 1. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.231.814.453,00	Rp 3.058.801.526,52	94,65
2. 1. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 854.373.000,00	Rp 801.593.680,00	93,82
2. 1. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 912.624.220,00	Rp 709.324.541,00	84,30
2. 1. 2.	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp 23.553.179.103,00	Rp 20.844.064.912,00	88,50
2. 1. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 6.577.330.250,00	Rp 5.951.909.400,00	90,49
2. 1. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.315.903.453,00	Rp 12.647.703.372,00	88,26
2. 1. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.161.673.000,00	Rp 1.841.455.690,00	85,19
2. 1. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 498.272.400,00	Rp 415.996.450,00	83,49
2. 1. 3.	Belanja Modal	Rp 16.005.049.200,00	Rp 14.566.259.826,00	91,01
2. 2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 379.874.870.591,00	Rp 334.853.680.300,63	88,15
2. 2. 1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 206.850.889.421,00	Rp 188.948.325.856,00	91,35
2. 2. 1. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 182.842.291.930,00	Rp 168.033.445.090,00	91,90
2. 2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.367.006.461,00	Rp 13.742.583.438,00	83,97
2. 2. 1. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.918.786.000,00	Rp 1.813.068.550,00	94,49
2. 2. 1. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 5.722.805.030,00	Rp 5.379.228.778,00	94,00
2. 2. 2.	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp 46.963.795.025,00	Rp 43.301.882.300,00	92,20
2. 2. 2. 1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 9.031.819.490,00	Rp 8.479.043.400,00	93,88
2. 2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 23.977.871.135,00	Rp 22.051.516.267,00	91,97
2. 2. 2. 3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.771.235.000,00	Rp 4.212.346.690,00	88,29
2. 2. 2. 4	Belanja Pemeliharaan	Rp 9.182.869.400,00	Rp 8.558.945.943,00	93,21
2. 2. 3.	Belanja Modal	Rp 61.189.780.925,00	Rp 55.621.387.991,93	90,90
2. 3.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 47.870.405.220,00	Rp 45.118.547.802,70	94,25
2. 4.	Belanja Tidak Tersangka	Rp 17.000.000.000,00	Rp 1.843.536.350,00	10,84
	JUMLAH BELANJA:	Rp 450.650.006.904,00	Rp 399.244.605.370,45	88,59
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	Rp (82.423.949.904,00)	Rp (7.357.703.324,21)	8,93

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	PEMBIAYAAN			
3 1	Penerimaan Daerah			
3 1 1 -	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 72.622.268.370,00	Rp 73.659.073.376,51	101,43
3 1 2 -	Transfer dari Dana Cadangan	Rp 19.036.041.445,00	Rp 19.036.041.445,00	100,00
3 1 3 -	Penerimaan Pinjaman, dan Obligasi	Rp -	Rp -	-
3 1 4 -	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
3 1 5 -	Hibah	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp 91.658.309.815,00	Rp 92.695.114.821,51	101,13
3 2	Pengeluaran Daerah			
3 2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3 2 2	Penyertaan Modal	Rp 6.446.042.500,00	Rp 6.445.041.672,80	100,00
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 1.032.600.000,00	Rp 1.032.398.926,35	99,98
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2005	Rp 880.717.411,00	Rp 76.983.970.898,15	8.741,05
3 2 5	Pemberian Piutang Daerah	Rp 875.000.000,00	Rp 875.000.000,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Daerah	Rp 9.234.359.911,00	Rp 85.337.411.497,30	924,13
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	Rp 82.423.949.904,00	Rp 7.357.703.324,21	8,93



CATATAN :

SILPA Tahun lalu terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 72.622.268.370,51
2. SILPA RSUD tahun 2004 sebesar Rp. 1.036.805.006,00
Rp. 73.659.073.376,51

SILPA Tahun 2005 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 75.604.476.512,15
2. SILPA RSUD tahun 2005 sebesar Rp. 1.379.494.386,00
Rp. 76.983.970.898,15

II
PERHITUNGAN KAS

I PENDAPATAN	Rp	391.886.902.046,24	
II BELANJA	Rp	399.244.605.370,45	
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp	(7.357.703.324,21)	
III PEMBIAYAAN			
- Penerimaan Daerah	Rp	92.695.114.821,51	
- Pengeluaran Daerah	Rp	8.353.440.599,15	
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp	84.341.674.222,36	
SILPA Tahun Anggaran 2005 :		Rp	<u>76.983.970.898,15</u>

- Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan merupakan :			
- Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Daerah	Rp	85.337.411.497,30	
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Thn Berjalan	Rp	(76.983.970.898,15)	
	Rp	8.353.440.599,15	

PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN SISA KAS

SILPA Tahun Anggaran 2005	Rp	75.604.476.512,15
Sisa Kas per tanggal 30 Desember 2005	Rp	73.399.493.719,15
Ditambah :		
Pembukuan-2 karena penyeteroran sisa UUDP Tahun Dinas Perhitungan (antara 1 Januari s/d 31 Desember 2005) pada bulan berikutnya Tahun Dinas Perhitungan (antara 1 Januari s/d 10 Januari 2006)		
	Rp	2.204.982.793,00
Jumlah :	Rp	<u>75.604.476.512,15</u>

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2005 merupakan :		
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemkot Tahun Berjalan	Rp	75.604.476.512,15
- Sisa Lebih RSUD Tahun Berjalan	Rp	1.379.494.386,00
	Rp	<u>76.983.970.898,15</u>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
N E R A C A (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2005 DAN 2004

No	Uraian	Jumlah (Rp)		No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2005	31 Desember 2004			31 Desember 2005	31 Desember 2004
ASET							
ASET LANCAR							
1	Kas di Kas Daerah	28.104.476.512,15	36.419.809.815,51				
2	Kas di Kas Swadana RSUD	1.379.494.386,00	1.036.805.006,00				
3	Kas Askes di Puskesmas	0,00	3.919.778,00	18	Hutang Komitmen	0,00	6.972.720.000,00
4	Deposito	47.500.000.000,00	36.202.438.555,00	19	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang	1.764.311.949,81	1.935.459.625,33
5	Piutang Pajak	1.685.601.233,00	1.330.331.617,50	20	Hutang Jangka Pendek Lainnya	1.200.277.207,80	63.084.247,00
6	Piutang Retribusi	232.919.602,00	412.008.233,00		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.964.589.157,61	8.971.263.872,33
7	Piutang Lain-lain	4.040.597.455,00	311.185.800,00				
8	Utang Muka Pembelian	0,00	1.072.000.000,00				
9	Persediaan	6.929.576.120,00	7.486.528.713,12				
	Jumlah Aset Lancar	89.872.665.308,15	84.275.047.518,13				
INVESTASI PERMANEN							
10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	48.012.095.432,80	41.566.053.760,00	21	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	8.945.003.200,00
11	Investasi Jangka Panjang	2.233.000.000,00	0,00	22	Hutang kepada Pemerintah Pusat	7.575.833.724,69	9.340.145.674,49
	Jumlah Investasi Permanen	50.235.095.432,80	41.566.053.760,00		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	7.575.833.724,69	18.285.148.874,49
ASET TETAP							
12	Tanah	132.094.309.330,00	126.687.919.599,00				
13	Jalan dan Jembatan	1.468.310.266.724,53	1.458.322.367.326,60				
14	Bangunan Air	4.638.432.645,00	3.832.629.305,00				
15	Instalasi	7.645.893.647,00	7.160.457.997,00	23	KEKUITAS DANA UMUM	2.112.478.124.783,39	1.991.012.812.227,12
16	Jaringan	54.190.059.861,00	39.230.604.700,00	24	KEKUITAS DANA CADANGAN		19.036.041.445,00
17	Bangunan Gedung	145.304.329.494,00	130.887.847.214,00	25	KEKUITAS DANA DONASI	12.334.267.517,90	11.612.575.567,00
18	Monumen dan Tugu	87.941.750,00	87.941.750,00				
19	Alat-alat Besar	21.452.139.445,00	21.452.139.445,00				
20	Alat Angkutan	26.452.581.752,00	23.367.028.502,00				
21	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.910.459.172,00	3.571.244.398,00				
22	Alat Pertanian	34.706.400,00	34.340.400,00				
23	Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.911.811.574,00	29.407.701.328,00				
24	Alat Studio dan Komunikasi	2.919.164.791,00	2.778.740.791,00				
25	Alat Kedokteran	5.885.567.598,00	3.505.894.598,00				
26	Buku/Perpustakaan	1.289.718.500,00	1.264.968.100,00				
27	Barang Beracak Seni	7.501.251.007,00	5.976.385.797,00				
28	Hewan, Ternak dan Tanaman	481.622.909,00	456.605.909,00				
29	Peralatan Kesamanan	0,00	0,00				
	Jumlah Aset Tetap	1.919.311.533.299,53	1.858.223.168.859,60				
DANA CADANGAN							
13		0,00	19.036.041.445,00				
ASET LAINNYA							
14	Bangunan Dalam Pengerjaan	24.069.402.325,00	10.957.074.486,00				
15	Piutang Angsuran	14.707.362.900,00	4.000.000.000,00				
16	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BOT)	36.661.755.917,21	29.392.455.917,21				
17	Penyertaan lain-lain	495.000.000,00	1.468.000.000,00				
	Jumlah Aset Lainnya	75.933.521.142,21	45.817.530.403,21				
JUMLAH ASET							
		2.135.352.815.182,69	2.048.917.841.965,94				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA							
		2.135.352.815.182,69	2.048.917.841.965,94				



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PER 31 DESEMBER 2005 DAN 2004

URAIAN	Per 31 Des 2005 (Rp)	Per 31 Des 2004 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1 Arus Kas Masuk		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Pajak Daerah	46.106.723.374,00	40.581.980.256,00
Retribusi Daerah	22.797.438.571,50	18.995.046.383,00
Bagian Laba dari Usaha Daerah	6.651.534.800,72	5.285.786.650,47
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	13.640.720.038,48	15.048.605.811,35
Total Pendapatan Asli Daerah	89.196.416.784,70	79.911.419.100,82
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT		
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39.446.429.477,00	37.889.440.614,00
Dana Alokasi Umum	201.231.000.000,00	197.787.000.000,00
Dana Alokasi Khusus	6.600.000.000,00	5.500.000.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	41.980.191.284,54	28.791.189.586,69
Total Dana Perimbangan	289.257.620.761,54	269.967.630.200,69
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
Bantuan Dana Kontijensi/Penyimbang dari Pemerintah	11.943.000.000,00	6.471.829.733,00
Dana Penyesuaian Ad Hoc	1.489.864.500,00	13.299.000.000,00
Total Lain-lain Pendapatan yang sah	13.432.864.500,00	19.770.829.733,00
Total Arus Kas Masuk	391.886.902.046,24	369.649.879.034,51
2 Arus Kas Keluar		
BELANJA APARATUR DAERAH		
Belanja Administrasi Umum	28.980.600.331,82	29.273.749.713,29
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	20.844.064.912,00	18.633.614.620,00
Jumlah Belanja Aparatur Daerah	49.824.665.243,82	47.907.364.333,29
BELANJA PELAYANAN PUBLIK		
Belanja Administrasi Umum	188.968.325.856,00	188.939.446.086,75
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	43.301.882.300,00	36.817.724.255,00
Sub Jumlah	232.270.208.156,00	225.757.170.341,75
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	45.118.547.802,70	30.974.792.481,00
Belanja Tidak Tersangka	1.843.536.350,00	4.996.667.725,00
Jumlah Belanja Pelayanan Publik	279.232.292.308,70	261.728.630.547,75
Total Arus Kas Keluar	329.056.957.552,52	309.635.994.881,04
3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	62.829.944.493,72	60.013.884.153,47
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Arus Kas Masuk		
Pendapatan dari Penjualan Investasi Jangka Panjang	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	-	412.709.850,00
Total Arus Kas Masuk		412.709.850,00
2 Arus Kas Keluar		
Belanja Modal / Pembangunan	70.187.647.817,93	60.080.485.733,00
Pembelian Investasi Jangka Panjang	-	-
Total Arus Kas Keluar	70.187.647.817,93	60.080.485.733,00
3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(70.187.647.817,93)	(59.667.775.883,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
1	Arus Kas Masuk	
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
	Transfer dari Dana Cadangan	19.036.041.445,00
	Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-
	Hibah	-
	Total Arus Kas Masuk	19.036.041.445,00
2	Arus Kas Keluar	
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	1.032.398.926,35
	Transfer Ke Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal	6.446.041.672,80
	Pemberian Piutang Daerah	875.000.000,00
	Total Arus Kas Keluar	8.353.440.599,15
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	10.682.600.845,85
		(3.824.990.874,83)
	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	3.324.897.521,64
	SALDO AWAL KAS	73.659.073.376,51
	SALDO AKHIR KAS	77.137.955.980,87
		76.983.970.898,15
		73.659.073.376,51

